

## Rekonstruksi Kepemimpinan Bangsa: Strategi Integrasi Teknologi Digital dan Kearifan Lokal di Sekolah Dasar

**Akbar Aba<sup>1</sup>, Muhammad Yusuf<sup>2</sup>, Fajrul Khaer<sup>3</sup>, Ilmiawan<sup>4</sup>, Saqjuddin<sup>5</sup>, Ilham Samudra Sanur<sup>6</sup>.**

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Makassar

<sup>2</sup>Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

<sup>3</sup>Universitas Muhammadiyah Makassar

<sup>4</sup>Universitas Muhammadiyah Makassar

<sup>5</sup>Universitas Sulawesi Tenggara

<sup>6</sup>Universitas Negeri Makassar

([akbaraba@unismuh.ac.id](mailto:akbaraba@unismuh.ac.id))

([esk.osmangaziunirek@hs01.kep.tr](mailto:esk.osmangaziunirek@hs01.kep.tr))

([fajrulkhaer@unismuh.ac.id](mailto:fajrulkhaer@unismuh.ac.id))

([ilmiawan@unismuh.ac.id](mailto:ilmiawan@unismuh.ac.id))

([saqjuddin@unismuh.ac.id](mailto:saqjuddin@unismuh.ac.id))

([aasanur177@gmail.com](mailto:aasanur177@gmail.com))

### **Abstract:**

*This research aims to explore the strategic role of educational leadership in maintaining national identity through the integration of technology and local wisdom in Indonesian primary schools. The study also highlights the gap in technology access between urban and rural areas and the challenges in curriculum development that can harmonize local cultural values with digital advancements. Using the literature review method, this study analyzes various literatures to understand the contribution of educational leadership to integrative policies that favor the preservation of national identity in the digital era. The findings show that educational leadership plays a central role in designing policies that not only encourage the use of technology, but also instill noble values of national culture. However, there are still significant barriers such as limited digital infrastructure, lack of locality-based teacher training, and lack of community involvement in curriculum formulation. Therefore, this study recommends strengthening inclusive policies, equitable technology investment, contextual teacher training and close collaboration with local communities to realize basic education that is firmly rooted in the nation's culture while being adaptive to the times.*

**Keywords:** Local Education Leadership, Education technology integration, School local wisdom, Preservation of national culture, National identity

### **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran strategis kepemimpinan pendidikan dalam menjaga jati diri bangsa melalui integrasi teknologi dan kearifan lokal di sekolah dasar di Indonesia. Studi ini juga menyoroti kesenjangan akses teknologi antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta tantangan dalam pengembangan kurikulum yang mampu mengharmoniskan nilai-nilai budaya lokal dengan kemajuan digital. Dengan menggunakan

metode tinjauan pustaka, kajian ini menganalisis literatur untuk memahami kontribusi kepemimpinan pendidikan terhadap kebijakan integratif yang berpihak pada pelestarian identitas kebangsaan di era digital. Hasil temuan menunjukkan bahwa kepemimpinan pendidikan berperan penting dalam merancang kebijakan yang mendorong pemanfaatan teknologi sekaligus penanaman nilai-nilai budaya. Hambatan yang ditemukan mencakup keterbatasan infrastruktur, kurangnya pelatihan guru berbasis lokalitas, dan minimnya keterlibatan komunitas. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan kebijakan inklusif, pemerataan investasi teknologi, pelatihan guru kontekstual, serta kolaborasi erat dengan masyarakat lokal.

**Kata Kunci:** Kepemimpinan Pendidikan Lokal, Integrasi Teknologi Pendidikan, Kearifan Lokal Sekolah, Pelestarian Budaya Bangsa, Jati Diri Bangsa

## A. PENDAHULUAN

Transformasi pendidikan di era digital menuntut adanya sinergi antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai lokal yang menjadi identitas bangsa. Sekolah dasar sebagai fondasi utama dalam pembentukan karakter dan literasi digital generasi muda memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara inovasi dan pelestarian budaya. Dalam konteks ini, kepemimpinan pendidikan memegang peranan penting sebagai pengarah, penggerak, dan penjaga arah kebijakan sekolah, khususnya dalam merancang strategi integrasi teknologi yang tetap berpijakan pada kearifan lokal (Sari, 2021).

Kearifan lokal merupakan bentuk pengetahuan kolektif masyarakat yang tumbuh dan berkembang dari nilai-nilai budaya, norma, serta praktik sosial yang diwariskan lintas generasi. Mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam sistem pembelajaran berbasis teknologi tidak hanya berfungsi untuk melestarikan budaya, tetapi juga untuk memperkuat identitas nasional peserta didik sejak usia dini (Mulyatiningsih, 2016). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa proses integrasi ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesenjangan infrastruktur teknologi antara wilayah perkotaan dan pedesaan, rendahnya literasi digital guru, serta belum optimalnya kurikulum yang adaptif terhadap konteks budaya lokal (Sundari et al., 2024).

Situasi ini mempertegas jurang antara ekspektasi terhadap kepemimpinan yang visioner dan transformatif dengan realitas kapasitas sumber daya manusia dan keterbatasan sistemik di lapangan. Meskipun literatur menekankan pentingnya kepemimpinan yang mampu menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan praktik, efektivitasnya sangat bergantung pada dukungan yang memadai, baik secara struktural maupun kultural (Sergiovanni, 1987). Kesenjangan antara arah kebijakan pendidikan nasional dengan kenyataan yang dihadapi sekolah-sekolah di lapangan menjadikan kebutuhan akan riset yang mendalam semakin mendesak untuk dilakukan. Penelitian Handayani et al. (2024) menunjukkan bahwa peran kepemimpinan pendidikan sangat penting dalam merumuskan kebijakan integrasi teknologi berbasis kearifan lokal, namun masih terdapat kesenjangan akses dan hambatan pengembangan kurikulum terutama di daerah dengan keterbatasan infrastruktur. Rekomendasi yang muncul adalah perlunya pengembangan kebijakan inklusif, peningkatan pelatihan guru, serta kolaborasi dengan komunitas lokal.

Selain itu, Dwiyama (2024) menegaskan bahwa model kepemimpinan berbasis kearifan lokal seperti nilai sipakatau, sipakalebbi, dan sipakainge mampu memperkuat budaya sekolah dan partisipasi masyarakat, sehingga dapat menjembatani tuntutan modernisasi



dengan pelestarian nilai-nilai budaya. Sementara itu, Ismaya et al. (2024) menyoroti pentingnya integrasi teknologi dan peningkatan kompetensi guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan relevan di sekolah dasar.

Dalam konteks kepemimpinan transformatif, Qurrota et al. (2025) menekankan bahwa kepemimpinan jenis ini mendorong inovasi pembelajaran dan adaptasi terhadap perubahan, termasuk dalam hal integrasi teknologi dan pelestarian nilai lokal. Model kepemimpinan kepala sekolah berbasis nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong-royong dan musyawarah juga terbukti efektif membangun budaya disiplin dan kolaborasi di sekolah dasar (Ramadani et al., 2025).

Situasi tersebut, kepemimpinan pendidikan yang visioner, adaptif, dan kontekstual sangat dibutuhkan untuk mengarahkan kebijakan dan praktik pembelajaran agar mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan akar budaya bangsa (Rasyid Ridha et al., 2021). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran kepemimpinan pendidikan dalam mengintegrasikan teknologi berbasis kearifan lokal di sekolah dasar, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang menyertainya sebagai dasar bagi pengembangan kebijakan pendidikan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Kepemimpinan pendidikan dalam konteks sekolah dasar tidak hanya sebatas pada fungsi administratif, melainkan juga berperan sebagai agen perubahan yang mampu menciptakan visi dan budaya sekolah yang berorientasi pada kemajuan sekaligus pelestarian nilai-nilai lokal (Ismaya et al., 2024). Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan memiliki tanggung jawab untuk merancang kebijakan yang mendukung integrasi teknologi dengan mempertimbangkan kondisi sosial-budaya masyarakat sekitar (Rosyad, 2023). Dalam hal ini, kolaborasi dengan guru, orang tua, dan tokoh masyarakat menjadi faktor kunci dalam menyusun strategi pembelajaran yang kontekstual, bermakna, dan berakar pada kehidupan nyata peserta didik. Kepemimpinan yang inklusif dan partisipatif akan mendorong lahirnya inovasi pendidikan yang sesuai dengan karakter lokal, namun tetap relevan dengan tuntutan global (Amin, 2017).

Integrasi teknologi berbasis kearifan lokal tidak dapat dilepaskan dari pentingnya pembangunan infrastruktur digital yang merata dan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Banyak sekolah dasar di daerah pedesaan masih menghadapi keterbatasan akses terhadap internet dan perangkat digital, yang secara langsung memengaruhi keberhasilan implementasi pembelajaran berbasis teknologi (Zahara et al., 2024). Oleh karena itu, kepemimpinan pendidikan harus mampu menjembatani kesenjangan tersebut melalui advokasi kebijakan, pemanfaatan sumber daya lokal, serta pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya mendukung transformasi digital pendidikan dasar secara merata, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai lokal tetap menjadi jiwa dalam proses pembelajaran yang memanusiakan dan membangun karakter kebangsaan.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (literature review) untuk menggali secara mendalam peran kepemimpinan pendidikan dalam mengintegrasikan teknologi dan kearifan lokal di sekolah dasar (Azhari et al., 2023a). Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin menggali pemahaman konseptual, strategi implementatif, serta tantangan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan berbasis budaya lokal di era digital. Sumber data diperoleh dari kebijakan pendidikan nasional seperti *Permendikbud No. 22 Tahun 2016* tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek. Sumber lain



mencakup jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku akademik, artikel prosiding, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kepemimpinan pendidikan, transformasi digital, dan pelestarian kearifan lokal.

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menyeleksi literatur yang relevan dari sumber-sumber ilmiah dan kebijakan pendidikan yang terpercaya. Literatur yang dipilih kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi kontribusi, tantangan, dan potensi dari masing-masing studi dalam konteks kepemimpinan pendidikan, integrasi teknologi, dan pelestarian nilai-nilai lokal. Pendekatan deskriptif-kualitatif diterapkan untuk menguraikan data secara mendalam dan memahami sejauh mana peran kepemimpinan pendidikan mampu menjembatani transformasi digital dengan pelestarian budaya lokal di sekolah dasar. Melalui metode ini, penelitian mampu menghimpun informasi yang signifikan untuk memperkaya perspektif konseptual dan menemukan strategi implementatif yang efektif dalam menjaga jati diri budaya bangsa di tengah arus digitalisasi yang terus berkembang.

Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dan analisis tematik (thematic analysis). Proses analisis dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari hasil pembacaan literatur, seperti kepemimpinan visioner, integrasi teknologi, strategi pelestarian budaya lokal, serta tantangan pelaksanaan di lapangan (Hartinah & Agung, n.d.). Untuk mendukung keakuratan temuan, dilakukan triangulasi sumber untuk membandingkan dan menguatkan temuan antara kebijakan resmi, teori konseptual, dan hasil studi empiris. Pendekatan metodologis ini diharapkan dapat menghasilkan sintesis pengetahuan yang mendalam, relevan, dan kontekstual bagi pengembangan kebijakan pendidikan dasar yang adaptif sekaligus berakar pada nilai budaya bangsa.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa kepemimpinan pendidikan memiliki peran sentral dalam menjaga jati diri bangsa melalui strategi integratif antara teknologi dan kearifan lokal. Pemimpin Pendidikan khususnya kepala sekolah berperan sebagai pengarah visi, fasilitator inovasi pembelajaran, sekaligus penjaga nilai-nilai budaya lokal agar tetap hidup di tengah arus globalisasi digital (Rofiki et al., 2024). Dalam sejumlah studi, ditemukan bahwa keberhasilan integrasi tersebut sangat bergantung pada komitmen dan sensitivitas budaya dari pemimpin sekolah dalam merespons konteks lokal yang ada di lingkungan satuan pendidikan dasar.

Beberapa praktik baik (*best practices*) ditemukan pada sekolah-sekolah dasar yang berhasil memadukan teknologi dengan kearifan lokal (Karmila & Achmad, n.d). Contohnya, penggunaan media digital untuk mendokumentasikan cerita rakyat, permainan tradisional yang diadaptasi ke dalam aplikasi interaktif, serta pemanfaatan platform pembelajaran daring yang memuat konten-konten lokal seperti bahasa daerah dan praktik adat. Kepemimpinan yang mendorong inovasi tersebut biasanya dicirikan oleh pendekatan partisipatif, kolaboratif dengan komunitas, serta keberanian untuk merancang kurikulum yang kontekstual.

Namun demikian, tantangan besar masih dihadapi oleh banyak sekolah dasar, terutama di wilayah pedesaan dan 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Literasi digital yang rendah di kalangan guru dan siswa, keterbatasan infrastruktur seperti koneksi internet dan perangkat, serta minimnya pelatihan yang berfokus pada integrasi teknologi lokal menjadi hambatan utama. Kepemimpinan pendidikan yang tidak adaptif terhadap kondisi ini cenderung gagal menciptakan lingkungan belajar yang mampu mengembangkan identitas budaya sekaligus literasi digital siswa (Sanoto et al., 2021).

Permendikbud No. 22 Tahun 2016 merupakan regulasi yang mengatur standar proses



pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Peraturan ini mulai berlaku sejak 28 Juni 2016 dan menggantikan Permendiknas No. 65 Tahun 2013. Standar proses tersebut mencakup kriteria pelaksanaan pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian hasil belajar, dan pengawasan proses pembelajaran (Permendikbud, 2016).

Peraturan ini ditegaskan bahwa proses pembelajaran harus dilakukan secara interaktif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi, serta disesuaikan dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik dan psikologis peserta didik. Komponen penting dalam proses pembelajaran adalah penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang memuat identitas sekolah, mata pelajaran, kelas/semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan indikator pencapaian, materi pembelajaran, serta metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik

Dalam konteks kebijakan, ditemukan bahwa sebagian besar kurikulum nasional masih bersifat sentralistik dan kurang memberi ruang fleksibilitas bagi sekolah dalam mengembangkan muatan lokal berbasis teknologi (Idrus, 2012). Oleh karena itu, peran kepemimpinan pendidikan juga meluas sebagai advokat kebijakan, yang mendorong adanya regulasi yang lebih fleksibel, memungkinkan sekolah menyusun kurikulum lokal yang mendayagunakan teknologi secara kreatif dan berbasis budaya.

Dalam konteks pembangunan karakter kebangsaan, kepemimpinan pendidikan yang tanggap terhadap nilai-nilai lokal mampu menjadi penguat identitas nasional di tengah derasnya arus informasi global. Ketika teknologi digunakan tanpa landasan budaya, siswa cenderung mengadopsi nilai-nilai luar secara mentah, yang dapat mengikis identitas lokal dan nasional mereka(Aba et al., 2023).

Penguatan kapasitas guru juga menjadi aspek penting. Kepala sekolah bertanggung jawab memastikan guru memiliki kompetensi pedagogik, teknologi, dan sosial-budaya yang memadai. Pelatihan guru harus mencakup pemahaman nilai kearifan lokal, aplikasi edukatif, dan teknik digital *storytelling* berbasis budaya setempat (Azhari et al., 2023b).

Kepemimpinan pendidikan harus mampu membangun kemitraan strategis dengan pemerintah daerah, lembaga kebudayaan, dan komunitas lokal untuk mengangkat kekayaan budaya sebagai konten pembelajaran dan mendukung pengembangan media ajar digital (Nasution et al., 2015). Kepala sekolah yang kolaboratif memiliki peluang lebih besar membangun ekosistem pendidikan holistik di mana teknologi menjadi penguat budaya.

Berdasarkan hasil kajian, dapat dianalisis bahwa kepemimpinan pendidikan di sekolah dasar memegang peranan krusial sebagai penghubung antara kebijakan nasional dan praktik lokal yang kontekstual. Secara teoretis, kepemimpinan visioner dan transformatif menjadi kunci dalam memadukan teknologi dengan kearifan lokal, sebagaimana dikemukakan oleh Rofiki et al. (2024) dan Azhari et al. (2023b). Pendekatan partisipatif dan kolaboratif yang melibatkan komunitas lokal memperkuat legitimasi dan keberlanjutan inovasi pembelajaran. Hal ini diperkuat oleh Qurrota et al. (2025) yang menekankan bahwa kepemimpinan transformatif mendorong terciptanya ruang belajar dinamis, adaptif, dan berorientasi pada nilai karakter dan budaya lokal.

Namun, secara normatif dan yuridis, kebijakan pendidikan nasional yang masih sentralistik (Idrus, 2012) menghambat fleksibilitas sekolah untuk mengembangkan kurikulum lokal berbasis teknologi. Studi Handayani et al. (2024) juga menegaskan bahwa kesenjangan akses antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta belum adanya kebijakan yang inklusif, menjadi tantangan besar dalam mewujudkan integrasi antara teknologi dan nilai lokal. Oleh karena itu, peran kepala sekolah tidak hanya sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai advokat



kebijakan sangat penting untuk memperjuangkan otonomi sekolah dan mendorong inovasi dari akar rumput.

Secara empiris, tantangan infrastruktur digital, kompetensi guru, dan keterbatasan pelibatan masyarakat lokal menjadi hambatan nyata yang perlu diatasi. Sanoto et al. (2021) dan Ismaya et al. (2024) menunjukkan bahwa keberhasilan integrasi teknologi memerlukan kompetensi guru yang tidak hanya memahami penggunaan teknologi, tetapi juga mampu mengemas konten berbasis budaya secara menarik dan bermakna. Sementara itu, Dwiyama (2024) menekankan bahwa model kepemimpinan berbasis nilai-nilai kearifan lokal Bugis—seperti *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *sipakainge*—memiliki kekuatan dalam membangun budaya sekolah yang inklusif dan menghargai konteks sosial.

Dari perspektif konseptual, temuan ini melahirkan kebaruan (novelty) dalam penelitian kepemimpinan pendidikan, yakni urgensi model kepemimpinan adaptif dan kontekstual yang menggabungkan literasi digital, sensitivitas budaya, dan kapasitas kolaboratif. Model ini bukan hanya menjembatani jurang antara kebijakan dan praktik, tetapi juga memperkuat posisi kepala sekolah sebagai agen perubahan yang relevan di tengah tantangan zaman.

Dengan demikian, penguatan kapasitas kepala sekolah melalui pelatihan yang terintegrasi dan berbasis lokalitas merupakan rekomendasi utama. Selain itu, kebijakan yang membuka ruang otonomi lebih besar bagi sekolah untuk mengembangkan kurikulum lokal berbasis teknologi dan budaya perlu menjadi perhatian serius pembuat kebijakan. Dengan pendekatan ini, pendidikan dasar di Indonesia tidak hanya mampu bersaing di era digital, tetapi juga tetap berpijak kokoh pada jati diri budayanya.

## D. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan pendidikan memegang peran strategis dalam menjaga jati diri bangsa melalui integrasi nilai-nilai kearifan lokal dengan kemajuan teknologi di lingkungan sekolah dasar. Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran memiliki tanggung jawab tidak hanya secara administratif, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu mengarahkan kebijakan dan praktik pembelajaran agar tetap berpijak pada nilai budaya, sekaligus adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan pendekatan visioner dan transformatif, pemimpin pendidikan dapat menciptakan visi sekolah yang berakar pada konteks lokal, membangun budaya partisipatif, serta mendorong inovasi pembelajaran berbasis teknologi yang kontekstual.

Hasil kajian literatur menegaskan bahwa strategi yang efektif dalam integrasi ini melibatkan pelibatan komunitas lokal, pengembangan bahan ajar berbasis budaya, serta penggunaan teknologi sebagai media pelestarian dan pewarisan nilai-nilai luhur, seperti melalui dokumentasi digital tradisi lokal atau pengajaran bahasa daerah secara daring. Model kepemimpinan partisipatif dan kolaboratif terbukti meningkatkan legitimasi program dan mendukung keberlanjutan inovasi. Namun demikian, tantangan utama yang muncul adalah rendahnya literasi digital guru, keterbatasan infrastruktur di wilayah 3T, serta kebijakan pendidikan yang cenderung sentralistik dan belum sepenuhnya memberi ruang bagi pengembangan kurikulum lokal berbasis teknologi.

Secara normatif, masih terdapat kesenjangan antara idealisme dalam dokumen kebijakan nasional dengan praktik di tingkat sekolah, yang membuat kepala sekolah perlu mengambil peran sebagai advokat perubahan kebijakan agar lebih responsif terhadap kebutuhan lapangan. Hal ini memerlukan dukungan sistemik, seperti pelatihan guru berbasis kearifan lokal, pengembangan platform pembelajaran yang memuat konten budaya, dan kemitraan dengan komunitas budaya serta pemerintah daerah.



Sebagai rekomendasi, penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas kepala sekolah dalam hal literasi digital, kepemimpinan budaya, dan manajemen perubahan. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih fleksibel dan kontekstual, memberikan ruang bagi sekolah untuk mengembangkan kurikulum lokal berbasis teknologi. Perlu dibangun ekosistem kolaboratif antara sekolah, masyarakat, dan lembaga kebudayaan agar proses pendidikan tidak hanya membentuk kecakapan abad 21, tetapi juga membangun karakter dan identitas budaya bangsa.

## REFERENSI

- Aba, A., Suryadi, K., & Matang, M. (2023). Pendidikan Politik di Partai Politik yang Impoten: Kajian Kritis Fenomena Calon Tunggal pada Pilkada. *PINUS: Jurnal Penelitian Inovasi Pembelajaran*, 8(2), 9–20. <https://doi.org/10.29407/pn.v8i2.19593>
- Amin, M. (2017). *Pendidikan Demokrasi untuk Generasi Muda*. Pustaka Pelajara.
- Azhari, C. D. S., Afif, Z., & Kustati, M. (2023a). Penelitian Mixed Method Research Untuk Disertasi. *Nana Sepriyanti INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3, 8010–8025.
- Azhari, C. D. S., Afif, Z., & Kustati, M. (2023b). Penelitian Mixed Method Research Untuk Disertasi. *Nana Sepriyanti INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3, 8010–8025.
- Idrus, M. (2012). MUTU PENDIDIKAN DAN PEMERATAAN PENDIDIKAN DI DAERAH. *PSIKOPEDAGOGIA Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 1(2). <https://doi.org/10.12928/psikopedagogia.v1i2.4603>
- Karmila, W., & Achmad, S. (n.d.). *PROSIDING Seminar Nasional PGSD “Transformasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Berbasis Teknologi” TRANSFORMASI NILAI KEARIFAN LOKAL BERBASIS TEKNOLOGI*.
- Mulyatiningsih, E. (2016). Pengembangan model pembelajaran. *Diakses Dari Http://Staff. Uny. Ac. Id/Sites/Default/Files/Pengabdian/Dra-Endang-Mulyatiningsih-Mpd/7cpengembangan-Model-Pembelajaran. Pdf. Pada September*.
- Nasution, W. N., Fakultas, D., Tarbiyah, I., Uin, K., & Medan, S. U. (2015). KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN DI SEKOLAH. *JURNAL TARBIYAH*, 22(1).
- Rasyid Ridha, M., Aba, A., Samudra Sanur, I., & Malihu, L. (n.d.). Implementasi Manajemen Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Sejarah: Menciptakan Generasi Pelajar Pancasila di SMA 23 Makassar. In *TERATAS: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT* (Vol. 2, Issue 1).
- Rofiki, Moh. R., Afifatur Rahmah, & Nadiatur Rohmah. (2024). Manajemen Pemasaran Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal: Upaya Peningkatan Kuantitas Santri di Era 4.0. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(6), 7629–7639. <https://doi.org/10.54373/imeij.v5i6.2247>
- Sanoto, H., Soegito, A., & Negeri Semarang, U. (n.d.). *Pengaruh Supervisi Akademik Terhadap Peningkatan Kompetensi Guru di Daerah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal) The Effect of Academic Supervision Towards The Improvement of Teachers' Competency in 3T Area (Frontier, Outermost, and Least Developes)*.
- Sari, D. , & H. S. (2021). *Evaluasi Program MBKM dalam Pengembangan Pendidikan Karakter dan Keterampilan Siswa*. 15(1), 22-36.
- Zahara, Z., Slameto, S., Yaumidin, U. K., Asnawi, R., C. Kifli, G., Qomariah, R., Sumaryanto, S., Priyanto, D., Wylis A, R., Diptaningsari, D., Novitasari, E., D. Suretno, N.,



- Meidaliyantisyah, M., Mawardi, R., Erdiansyah, E., & Agustiani, M. (2024). Persepsi dan Keputusan Adopsi Inovasi Teknologi Berbasis Kearifan Lokal Pada Budidaya Kopi di Lampung. *Jurnal Kawistara*, 14(2), 226. <https://doi.org/10.22146/kawistara.82505>
- Dwiyama, F. (2024). *Implementasi Kepemimpinan Kearifan Lokal Bugis pada Manajemen Berbasis Sekolah di Kabupaten Bone*. 1, 20–28.
- Handayani, L., Samosir, E. N., Riana, D., Turan, S. I., & Dwiyono, Y. (2024). Peran Kepemimpinan Pendidikan Dalam Mengintegrasikan Teknologi Berbasis Kearifan Lokal Di Sekolah Dasar Negeri. *Sistema: Jurnal Pendidikan*, 5(1).
- Hartinah, S., & Agung, R. (n.d.). *Model Kepemimpinan Kepala Sekolah Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Mengembangkan Budaya Disiplin Guru di Sekolah Dasar*. 5(4), 6398–6405.
- Ismaya, P., Aisyah, A., Sibuea, J. M., & Marini, A. (2024). Mengoptimalkan Manajemen Pendidikan SD yang Efektif dengan Teknologi dan Standar Kompetensi Guru. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(3), 11.
- Permendikbud, R. I. (2016). Permendikbud RI Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI.
- Qurrota, U., Sulisworo, D., & Maryani, I. (2025). *Implementasi pendidikan transformatif di sekolah dasar*. 193–199. <https://doi.org/10.12928/sntekad.v2i1.19044>
- Ramadani, D. F., Mufdolifah, R. I., & Umam, M. K. (2025). *PENINGKATAN PEMBELAJARAN DI SDN*. 10(1), 195–208.
- Rosyad, M. I. (2023). Keefektifan kepemimpinan kepala sekolah dalam mengembangkan budaya sekolah (studi kasus di SDN kalijudan I 239 surabaya). *Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 11(2), 378–391.
- Sergiovanni, T. J. (1987). *The principalship: A reflective practice perspective*. ERIC.
- Sundari, A., Fauzia, F. I., Zulfikar, M. F., & Adinda, R. (2024). *Pengintegrasian Teknologi dalam Kurikulum Sekolah Dasar : Peran Kebijakan dalam Pembelajaran Digital*. 4, 5115–5125.

